

PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA LEBANON DENGAN NEGARA TURKI

Chesa Fabita M.R.
Universitas Hang Tuah
Chesafabita27@gmail.com
*Corresponding Author: Chesafabita27@gmail.com

Histori Artikel

Submitted
4 April 2024
Reviewed
29 Juni 2024
Accepted
29 Juni 2024
Published
30 Juni 2024

Abstrak

Negara menjadi sebuah wadah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik dan menjaga kedamaian sosial. Negara Lebanon dan Turki memiliki karakteristik dan sistemnya sendiri dalam menjalankan roda kehidupan, tentunya terdapat perbedaan-perbedaan dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan mendeskripsikan sistem administrasi negara Lebanon dengan Turki. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research). Sumber data berasal dari artikel jurnal, literatur, media massa online, dan Internet. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi, melalui peninggalan tertulis terutama berbentuk arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, konsep, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Penelitian ini mengungkap beberapa perbandingan antara Lebanon dan Turki dalam berbagai aspek politik, ekonomi, hukum, dan administrasi. Lebanon dan Turki keduanya adalah negara berkembang dengan tantangan internal yang mencakup konflik, ketergantungan sektor tertentu, dan infrastruktur yang belum matang. Namun, pendekatan politik dan filosofi negara keduanya memiliki perbedaan yang signifikan.

Kata Kunci: Perbandingan sistem administrasi, Lebanon, Turki

Abstract

The state becomes a forum so that people can live their lives well and maintain social peace. Lebanon and Turkey have their own characteristics and systems for running life, of course there are differences from a social, economic and political perspective. This research aims to compare and describe the state administration system of Lebanon and Türkiye. The research was carried out using qualitative methods in the nature of library research. Data sources come from journal articles, literature, online mass media, and the Internet. The data collection technique in this research is documentation, through written remains, especially in the form of archives and including books about opinions, theories, propositions, concepts or laws related to research problems. The research results show that this research reveals several comparisons between Lebanon and Turkey in various political, economic, legal and administrative aspects. Lebanon and Turkey are both developing countries with internal challenges that include conflict, sector-specific dependencies, and immature infrastructure. However, the political approaches and philosophies of both countries have significant differences.

Keywords: Comparison of administrative systems, Lebanon, Türkiye

PENDAHULUAN

Negara adalah sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam suatu wilayah dan diakui oleh rakyatnya. Negara terdiri dari beberapa elemen, yaitu wilayah, pemerintahan, rakyat, dan pengakuan atau kedaulatan. Administrasi adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Perbandingan adalah membandingkan dua atau lebih hal dengan hal lainnya. Administrasi negara perbandingan berarti membandingkan administrasi di dua atau lebih negara yang berbeda. Pendekatan terhadap administrasi negara bisa berbeda-beda, sehingga menghasilkan pandangan yang berbeda pula. Perbandingan ini dilakukan untuk memahami berbagai organisasi kenegaraan dan kegiatan setiap organisasi dalam mencapai tujuan negaranya. Administrasi negara memiliki pengertian kolektif yang mencakup seluruh proses penyelenggaraan negara sebagai suatu organisasi, termasuk organ/lembaga dan fungsi masing-masing, yang semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan negara yang bersangkutan. (Laksono et al., 2023).

Pembentukan Republik Lebanon baru melalui Kesepakatan Ta'if 1989 merupakan langkah penting dalam sejarah politik negara tersebut. Kesepakatan ini tidak bertujuan untuk menghapus sistem konfessional yang telah lama menjadi ciri khas pemerintahan Lebanon. Sebaliknya, kesepakatan ini memperbaiki dan memodernisasi sistem tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Asmar, Kisirwani, dan Springborg (1999). Salah satu perubahan signifikan adalah penyesuaian komposisi kursi dalam pemerintahan. Sebelumnya, kursi pemerintahan didominasi oleh komunitas Kristen Maronit. Namun, melalui Kesepakatan Ta'if, kursi-kursi tersebut dibagi secara lebih seimbang antara kelompok Kristen dan Islam. pembagian ini didominasi oleh tiga sekte besar: Maronit, Sunni, dan Syiah. Kesepakatan ini tidak hanya mencerminkan keinginan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan yang lebih adil, tetapi juga mengakui dinamika demografis dan politik yang ada di Lebanon. Sekte Syiah, yang sebelumnya kurang memiliki representasi signifikan dalam pemerintahan, berhasil meningkatkan kekuatan politiknya secara substansial melalui kesepakatan ini. Perubahan dalam distribusi kekuasaan ini menunjukkan upaya serius untuk mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok agama di Lebanon, serta untuk meredakan ketegangan sektarian yang telah lama menjadi sumber konflik di negara tersebut. Kesepakatan Ta'if, dengan demikian, dianggap sebagai langkah maju dalam menciptakan struktur pemerintahan yang lebih inklusif dan representatif bagi seluruh masyarakat Lebanon.. (Mukhsinin, 2022).

Turki awalnya menerapkan sistem pemerintahan kekhalifahan selama berabad-abad. Pada tahun 1924, setelah mengalami kemunduran di berbagai bidang yang memicu gerakan separatisme dan munculnya gerakan modernisasi di pusat pemerintahan, Turki berubah menjadi republik. Ketika Republik Turki pertama kali didirikan, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah parlementer. Namun, pada tahun 2017, Presiden Erdogan mengadakan referendum, dan mayoritas warga negara Turki memilih untuk mengubah sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial. Turki, yang selama berabad-abad beroperasi di bawah sistem kekhalifahan, mengalami transformasi besar pada tahun 1924 menjadi sebuah republik. Transformasi ini terjadi sebagai respons terhadap berbagai kemunduran yang memicu gerakan separatisme dan memunculkan gerakan modernisasi di pusat pemerintahan. Pada awal berdirinya Republik Turki, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah parlementer. Namun, pada tahun 2017, melalui referendum yang diinisiasi oleh Presiden Erdogan, mayoritas warga negara Turki memilih untuk mengubah sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial.. (Albarkah, 2023).

Lebanon dan Turki, meskipun sama-sama terletak di wilayah Timur Tengah, memiliki sejarah, budaya, dan sistem politik yang sangat berbeda. Lebanon dikenal dengan sistem politik konfessionalisme, di mana kekuasaan dibagi berdasarkan kelompok agama. Sistem ini merupakan cerminan dari masyarakat Lebanon yang beragam, terdiri dari berbagai kelompok agama seperti Maronit Kristen, Muslim Sunni, Muslim Syiah, dan Druze. Pembagian kekuasaan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan dan mencegah dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya. Namun, sistem ini juga sering menyebabkan kebuntuan politik dan konflik internal, karena setiap keputusan penting harus mendapat persetujuan dari semua kelompok yang terlibat. di sisi lain, Turki memiliki sejarah yang panjang sebagai pusat Kekaisaran Ottoman sebelum berubah menjadi republik modern pada tahun 1923 di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Transformasi ini menandai peralihan besar dari sistem kekhalifahan yang berbasis agama ke sistem pemerintahan sekuler. Atatürk melakukan berbagai reformasi untuk memodernisasi Turki, termasuk pemisahan agama dari urusan negara, pengenalan hukum sipil, dan adopsi alfabet Latin. Baru-baru ini, Turki kembali mengalami perubahan signifikan dengan peralihan dari sistem parlementer ke sistem presidensial pada tahun 2018, di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Perubahan ini memberikan presiden kekuasaan eksekutif yang lebih besar dan mengubah dinamika administrasi negara secara drastis. (Baharuddin Riqiey, 2024).

Lebanon dan Turki, meskipun sama-sama berada di wilayah Timur Tengah, memiliki sejarah dan

dinamika politik yang sangat berbeda. Lebanon adalah negara dengan sistem politik konvensional yang sangat dipengaruhi oleh berbagai kelompok etnis dan agama. Sementara itu, Turki adalah negara yang mengalami transisi dari sistem pemerintahan sekuler menuju sistem yang lebih terpengaruh oleh agama di bawah pemerintahan AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan). Perbedaan ini menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam administrasi negara masing-masing. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan kedua sistem tersebut untuk memahami bagaimana perbedaan ini mempengaruhi efektivitas administrasi publik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode Kualitatif dan mengumpulkan data melalui literature review, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber sekunder. Pendekatan ini dimulai dengan identifikasi sumber-sumber literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, laporan pemerintah, dan publikasi lainnya yang membahas sistem administrasi publik di Lebanon dan Turki. Proses pencarian dilakukan melalui basis data akademik, perpustakaan digital, dan sumber-sumber online yang kredibel. Kriteria inklusi untuk literatur yang dipilih mencakup relevansi topik, kredibilitas sumber, serta cakupan waktu publikasi yang mencerminkan perkembangan terkini dalam sistem administrasi kedua negara. Setelah mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan, dilakukan peninjauan kritis untuk menilai kualitas dan validitas informasi yang disajikan. (Crisnaldy & Raya, 2021).

HASIL

Bentuk Negara Lebanon Dengan Negara Turki

1. Negara Lebanon

Lebanon adalah sebuah republik parlementer yang memiliki sistem politik konvensionalisme. Sistem ini mengatur pembagian kekuasaan berdasarkan kelompok agama, yang merupakan refleksi dari keragaman etnis dan agama di negara tersebut. Konstitusi Lebanon, yang didasarkan pada Piagam Nasional tahun 1943, mengatur bahwa jabatan-jabatan utama pemerintahan harus dipegang oleh anggota dari komunitas agama yang berbeda: Presiden harus seorang Maronit Kristen, Perdana Menteri harus seorang Muslim Sunni, dan Ketua Parlemen harus seorang Muslim Syiah. Sistem politik ini dirancang untuk memastikan representasi yang adil dari semua kelompok etnis dan agama, namun sering kali menyebabkan kebuntuan politik dan ketidakstabilan karena setiap kelompok memiliki hak veto terhadap keputusan penting. (Samir G.Khalaf, n.d.)(Samir G.Khalaf, n.d.)

2. Negara Turki

Turki adalah sebuah republik presidensial, setelah beralih dari sistem parlementer pada tahun 2018. Sebelumnya, Turki adalah sebuah republik parlementer sejak didirikan pada tahun 1923 oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang melakukan reformasi besar-besaran untuk membentuk negara yang sekuler dan modern. Perubahan ke sistem presidensial, yang diresmikan melalui referendum konstitusional, memberikan presiden kekuasaan eksekutif yang lebih besar, termasuk mengangkat dan memberhentikan menteri, mengeluarkan dekret eksekutif, dan membubarkan parlemen. Presiden juga menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan stabilitas politik, namun juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi peningkatan otoritarianisme dan pengurangan checks and balances dalam pemerintahan. (European Committee Of Regions, n.d.)

Profil Negara Lebanon dan Negara Turki

Negara Lebanon

a. Posisi Geografis

Lebanon adalah wilayah kecil dengan kompleksitas luar biasa. Ia menawarkan paradoks yang menarik untuk dipahami. Memiliki ukuran kecil yakni 10.452 km², negara ini menempati posisi strategis tersendiri. Lebanon terletak di persimpangan Mediterania dan Timur Arab dan merupakan tempat lahirnya peradaban sejak Paleolitikum. Sepanjang sejarah, negara pegunungan ini telah menyaksikan periode pendudukan asing berturut-turut: peradaban Mesir, Yunani, Romawi, Bizantium, Arab, Tentara Salib, dan Ottoman. Karena posisinya, sejarah dan bentang alamnya, Lebanon selalu berada di jantung situasi geopolitik yang kompleks di Timur Tengah. Lebanon terletak di Timur Tengah, berbatasan dengan Laut Mediterania di sebelah barat, Suriah di sebelah utara dan timur, serta Israel di sebelah selatan. Negara ini memiliki luas garis pantai yang panjangnya sekitar 225 kilometer. Topografi Lebanon beragam, dengan pegunungan yang membentang dari utara ke selatan, dataran pesisir yang sempit, serta Lembah Bekaa yang subur di bagian timur. (Jocelyne Gerard and Carole Nehme, 2020)

b. Demografi

Lebanon adalah negara yang dihuni oleh sekitar 6 juta jiwa, yang merupakan campuran dari berbagai kelompok etnis dan agama. Kelompok-kelompok utama yang mendominasi populasi Lebanon meliputi Maronit Kristen, Muslim Sunni, Muslim Syiah, Druze, serta komunitas-komunitas kecil lainnya seperti Kristen Ortodoks dan Armenia. Keragaman ini memberikan warna unik bagi struktur sosial dan politik negara. Sistem politik konfensional Lebanon tercermin dalam pembagian kekuasaan yang didasarkan pada identitas agama, yang merupakan ciri khas dari negara ini. Meskipun demikian, meskipun terdapat ketegangan sosial dan politik antar kelompok, Lebanon juga terkenal karena kerukunan antaragama yang relatif baik di antara penduduknya.

Populasi Lebanon sebagian besar terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Beirut, ibu kota negara ini, serta kota-kota lain seperti Tripoli dan Sidon. Urbanisasi yang tinggi mencerminkan dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang pesat di negara ini. Kehidupan kota yang sibuk dan kosmopolitan menciptakan lingkungan yang beragam budaya dan ekonomi. Namun, urbanisasi juga menimbulkan tantangan seperti kemacetan lalu lintas, polusi, dan tekanan pada infrastruktur kota. Meskipun terdapat perbedaan dalam agama dan kepercayaan di antara penduduknya, Lebanon telah dikenal karena toleransi dan kerukunan antaragama yang relatif baik. Tradisi pluralisme agama dan keberagaman budaya telah menjadi bagian dari identitas Lebanon. Terdapat keragaman dalam praktik keagamaan dan budaya yang dihormati, serta adanya tradisi berbagi dan keterbukaan terhadap keberagaman. Meskipun terdapat tantangan dan konflik, penduduk Lebanon sering menunjukkan semangat kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi perbedaan dan rintangan bersama. (Joseph Y Bakhach and Jana Doghman, 2023)

c. Ekonomi

Ekonomi Lebanon didominasi oleh sektor jasa, yang meliputi aktivitas perbankan, pariwisata, dan perdagangan. Beirut, sebagai ibu kota Lebanon, menonjol sebagai pusat keuangan dan perbankan terkemuka di Timur Tengah. Sebagai salah satu kota yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan internasional, Beirut menjadi tempat berkumpulnya banyak lembaga keuangan dan institusi perbankan regional dan internasional. Selain itu, sektor pariwisata juga memiliki peran penting dalam ekonomi Lebanon, dengan daya tarik seperti situs sejarah, keindahan alam, dan budaya yang kaya menarik wisatawan dari seluruh dunia. Sektor perdagangan juga berkembang dengan adanya pelabuhan yang strategis di Beirut yang menjadi pusat aktivitas ekspor dan impor.

Ekonomi Lebanon menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Krisis keuangan yang parah telah mengguncang negara ini, ditandai dengan masalah seperti defisit anggaran yang besar, utang publik yang tinggi, dan inflasi yang meroket. Krisis keuangan ini telah menyebabkan ketidakstabilan

ekonomi yang serius dan memicu protes massal di seluruh negara. Selain itu, sektor industri dan pertanian, meskipun masih berperan dalam ekonomi, memiliki kontribusi yang lebih kecil dibandingkan sektor jasa. Krisis politik dan konflik regional juga sering kali mengganggu stabilitas ekonomi Lebanon, menciptakan ketidakpastian yang merugikan bagi investor dan menyebabkan penurunan investasi dalam jangka panjang. Dengan demikian, sementara Lebanon memiliki potensi ekonomi yang besar, tantangan ekonomi yang kompleks dan ketidakstabilan politik tetap menjadi hambatan dalam upaya pertumbuhan dan pembangunan negara ini. (Clovis F. Maksoud, 2022)

d. Akuntansi

Akuntansi negara Lebanon diatur oleh Kementerian Keuangan, yang memegang tanggung jawab utama dalam pengelolaan keuangan publik. Salah satu tugas utamanya adalah menyusun anggaran negara yang mencakup alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah. Selain itu, Kementerian Keuangan juga bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akurat, yang mencerminkan penggunaan dana publik secara efektif dan bertanggung jawab. Untuk memastikan akuntabilitas dan keterbukaan, sistem akuntansi publik Lebanon mengikuti standar akuntansi internasional yang diakui secara global. Sistem akuntansi publik Lebanon sering mengalami masalah dalam hal transparansi dan efisiensi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pengelolaan utang publik yang besar. Utang publik Lebanon telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan pengelolannya menjadi prioritas penting dalam upaya memperbaiki keuangan publik negara ini. Selain itu, penggunaan dana publik sering kali kurang efektif karena adanya praktik korupsi, pemborosan, dan kurangnya pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan publik.

Reformasi keuangan dan peningkatan transparansi telah menjadi agenda penting dalam upaya memperbaiki sistem akuntansi negara dan meningkatkan kepercayaan publik serta investor internasional terhadap perekonomian Lebanon. Upaya-upaya reformasi ini mencakup peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik, penguatan aturan dan prosedur pengadaan, serta promosi akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki efisiensi pengelolaan keuangan publik dan mengurangi risiko korupsi, sehingga memperkuat fondasi ekonomi Lebanon dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. (Sami F. Sadaka, 2022)

Negara Turki

a. Posisi Geografis

Negara Turki memiliki wilayah yang cukup besar yakni dengan luas mencapai 783.562 km². Untuk sistem pemerintahan yang ada di Turki adalah menganut Republik Parlementer dimana kepala negaranya adalah Presiden dan untuk kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Tercatat penduduk Turki saat ini adalah 83.614.362 jiwa dengan mayoritasnya adalah etnis Turki dan Kurdi. Sekitar 99,8% penduduk Turki adalah pemeluk agama Islam. Bahasa resmi Turki adalah Bahasa Turki. Berikut ini letak geografis Turki:

- 1) Di bagian Barat Daya, negara Turki berbatasan langsung dengan negara Bulgaria.
- 2) Di bagian Barat, negara Turki berbatasan langsung dengan negara Yunani serta Laut Aegea.
- 3) Di bagian Timur serta Timur Laut, negara Turki berbatasan langsung dengan negara Suriah dan negara Irak.
- 4) Di bagian Selatan, negara Turki berbatasan langsung dengan Laut Mediterania.
- 5) Di bagian Utara, negara Turki berbatasan langsung dengan Laut Hitam

b. Demografi

Turki adalah negara yang sangat beragam secara etnis dan agama. Mayoritas penduduknya adalah Muslim Sunni, meskipun ada minoritas Muslim Alevi, Muslim Syiah, dan non-Muslim seperti Kristen dan Yahudi. Bahasa resmi negara ini adalah Bahasa Turki, meskipun ada juga bahasa-bahasa minoritas seperti Kurdi, Arab, dan Laz yang digunakan oleh komunitas-komunitas etnis tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, urbanisasi telah meningkat pesat di Turki, dengan banyak

penduduk yang bermigrasi dari pedesaan ke kota-kota besar seperti Istanbul, Ankara, dan Izmir. (European Committee Of Regions, n.d.)

c. Ekonomi

Turki memiliki ekonomi yang beragam, dengan sektor-sektor utama termasuk industri manufaktur, pertanian, dan pariwisata. Negara ini memiliki sumber daya alam yang beragam, termasuk tambang mineral, kehutanan, dan sumber daya energi seperti batu bara, gas alam, dan hidroelektrik. Industri manufaktur Turki berkembang pesat, dengan fokus utama pada tekstil, otomotif, teknologi informasi, dan produk-produk elektronik. Selain itu, sektor pariwisata juga penting bagi ekonomi Turki, dengan tempat-tempat wisata sejarah dan alam yang menarik seperti Istanbul, Pamukkale, dan Cappadocia menjadi destinasi populer bagi wisatawan domestik dan internasional. (One World, 2024)

d. Akuntansi

Sistem akuntansi di Turki didasarkan pada prinsip-prinsip dan standar akuntansi internasional yang berlaku umum. Dewan Standar Akuntansi Turki (TMSK) bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi yang sesuai dengan praktik internasional dan memastikan kepatuhan oleh perusahaan-perusahaan di Turki. Sejak tahun 2005, Turki telah mengadopsi standar akuntansi internasional (IAS) dan standar pelaporan keuangan internasional (IFRS) untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan. Profesi akuntan di Turki diatur oleh organisasi seperti Kamar Akuntan Sertifikasi (TÜRMOB) yang memberikan sertifikasi kepada para profesional akuntansi yang memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan. (One World, 2024)

Sistem Pemerintahan Negara Lebanon dan Turki

Negara Lebanon

Sistem pemerintahan negara Lebanon merupakan sebuah konsep yang unik, yang didasarkan pada prinsip konfessionalisme. Konfessionalisme ini mengatur pembagian kekuasaan politik berdasarkan kelompok agama utama di negara tersebut. Lebanon memiliki keragaman etnis dan agama yang signifikan, dengan kelompok-kelompok seperti Maronit Kristen, Muslim Sunni, Muslim Syiah, dan Druze. Struktur politik Lebanon tercermin dari keragaman ini, dengan setiap kelompok agama memiliki peran penting dalam pemerintahan. Konstitusi Lebanon, yang telah mengalami beberapa revisi sejak negara ini merdeka pada tahun 1943, menetapkan kuota politik berdasarkan agama, yang memastikan bahwa jabatan-jabatan utama pemerintahan diisi oleh perwakilan dari kelompok-kelompok agama tertentu. Sebagai contoh, Presiden Lebanon harus berasal dari komunitas Maronit Kristen, Perdana Menteri dari komunitas Muslim Sunni, dan Ketua Parlemen dari komunitas Muslim Syiah. Meskipun sistem ini didesain untuk menjaga keseimbangan antar kelompok dan mencegah dominasi satu kelompok atas yang lain, namun sering kali menyebabkan ketegangan politik dan kebuntuan dalam pengambilan keputusan. Karena setiap keputusan penting harus mendapat persetujuan dari berbagai kelompok agama, hal ini sering kali memperlambat proses kebijakan dan menyulitkan negara dalam merespon tantangan politik dan ekonomi yang kompleks. (Jocelyne Gerard and Carole Nehme, 2020)

Negara Turki

Sistem pemerintahan negara Turki Setelah pendirian Republik Turki pada tahun 1923 oleh Mustafa Kemal Atatürk, negara ini mengalami sejarah politik yang panjang dan penuh dengan perubahan. Awalnya, Turki mengadopsi sistem parlementer yang mirip dengan banyak negara Eropa. Sistem ini memberikan kekuasaan eksekutif kepada seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen, sementara presiden memiliki peran seremonial yang terbatas. Namun, pada tahun 2018, Turki mengalami perubahan konstitusi yang mengubahnya menjadi negara dengan sistem presidensial. Perubahan ini merupakan hasil dari referendum konstitusional yang kontroversial yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdoğan dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).

Sistem presidensial yang baru memberikan presiden Turki kekuasaan eksekutif yang lebih besar, menggantikan jabatan Perdana Menteri, dan memberinya kontrol atas kabinet dan proses legislatif. Presiden juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan dekret eksekutif, mengangkat hakim, dan membubarkan parlemen. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan stabilitas politik dan efisiensi pemerintahan dengan memberikan presiden kekuatan yang lebih besar untuk mengambil keputusan cepat dan tindakan dalam menghadapi tantangan dalam negeri dan luar negeri. Namun, perubahan ini juga telah memicu kritik dari beberapa pihak yang mengkhawatirkan peningkatan otoritarianisme dan penurunan checks and balances dalam pemerintahan. Beberapa pengamat dan kelompok hak asasi manusia menganggap bahwa perubahan tersebut mengkonsolidasikan kekuasaan dalam tangan presiden dan mengurangi ruang bagi oposisi politik serta kebebasan sipil. Dengan demikian, perubahan menuju sistem presidensial di Turki mencerminkan dinamika politik yang kompleks dan terus berkembang di negara tersebut. (European Committee Of Regions, n.d.)

Birokrasi Negara Indonesia dan Brunei Darussalam

Negara Lebanon

Birokrasi di Negara Lebanon adalah refleksi dari struktur politik yang unik, yang didasarkan pada prinsip konfensionalisme. Konfensionalisme mengatur pembagian kekuasaan politik berdasarkan kelompok agama utama di negara tersebut, yang meliputi Maronit Kristen, Muslim Sunni, Muslim Syiah, dan Druze. Dalam konteks birokrasi, kehadiran dan pengaruh berbagai kelompok agama menjadi faktor penting dalam administrasi publik. Struktur birokrasi di Lebanon cenderung terfragmentasi, dengan masing-masing departemen dan lembaga pemerintah sering kali dikelola oleh pejabat dan staf yang berasal dari kelompok agama tertentu. Misalnya, dalam sebuah departemen pemerintah, posisi kepemimpinan mungkin diisi oleh seorang pejabat yang berasal dari kelompok Maronit Kristen, sementara pegawai lainnya berasal dari kelompok Muslim Sunni atau Syiah. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan representasi antara berbagai kelompok agama dalam birokrasi.

Fragmentasinya struktur birokrasi juga dapat menyebabkan kompleksitas administratif dan kesulitan dalam koordinasi antar lembaga pemerintah. Keterbatasan komunikasi dan koordinasi antara departemen yang dikelola oleh kelompok agama yang berbeda dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Selain itu, patronase politik sering kali menjadi faktor penting dalam pengangkatan dan promosi pegawai negeri di Lebanon. Praktik ini dapat mengganggu kinerja birokrasi dengan memprioritaskan loyalitas politik daripada kompetensi profesional, dan juga meningkatkan risiko korupsi dalam administrasi publik. Secara keseluruhan, birokrasi di Lebanon mencerminkan kompleksitas politik dan etnis dalam negara tersebut. Meskipun upaya telah dilakukan untuk menciptakan keseimbangan representasi antara berbagai kelompok agama, terfragmentasinya struktur birokrasi dan intervensi politik masih menjadi tantangan dalam mencapai efisiensi dan transparansi dalam administrasi publik. (Jocelyne Gerard and Carole Nehme, 2020)

Negara Turki

Birokrasi di Turki telah mengalami transformasi yang signifikan sepanjang sejarahnya, yang dipengaruhi oleh perubahan politik dan sosial yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Sebelum perubahan konstitusi tahun 2018 yang mengubah Turki menjadi negara dengan sistem presidensial, birokrasi Turki beroperasi di bawah sistem parlementer yang lebih tradisional. Pada masa itu, kekuasaan eksekutif terpusat pada jabatan Perdana Menteri, sementara presiden memiliki peran yang lebih seremonial. Birokrasi berfungsi dalam kerangka hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh parlemen, dengan struktur dan proses yang sesuai dengan sistem parlementer. Namun, dengan transisi ke sistem presidensial, terjadi penyesuaian besar-besaran dalam struktur dan fungsi birokrasi. Presiden Turki sekarang memiliki kekuasaan eksekutif yang lebih besar dan mengendalikan banyak aspek administratif negara. Hal ini termasuk pengangkatan dan promosi pejabat tinggi dalam birokrasi, serta pengelolaan kebijakan publik yang signifikan. Transisi ini juga menyebabkan perubahan dalam dinamika antara presiden dan parlemen, dengan presiden yang memegang kendali lebih besar atas agenda politik dan kebijakan negara.

Meskipun birokrasi Turki tetap menjadi salah satu elemen penting dalam administrasi publik negara tersebut, transisi ke sistem presidensial telah menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan peningkatan intervensi politik dalam birokrasi serta penurunan independensi lembaga-lembaga pemerintah. Beberapa kritikus mengkhawatirkan bahwa kekuasaan eksekutif yang lebih besar yang dimiliki oleh presiden dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan penurunan akuntabilitas. Namun, di sisi lain, pendukung perubahan tersebut berpendapat bahwa sistem presidensial memberikan stabilitas politik yang lebih besar dan memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien. dalam konteks ini, birokrasi Turki tetap memegang peran yang sangat signifikan dalam menerapkan kebijakan dan memastikan fungsi pemerintahan yang efektif. Meskipun terjadi perubahan dalam dinamika kekuasaan antara presiden dan lembaga-lembaga lainnya, birokrasi tetap menjadi tulang punggung administrasi publik Turki, dengan tanggung jawab yang luas dalam menjalankan berbagai aspek pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Audi Izzat Muttaqien, 2023)

DISKUSI

Dari hasil yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dari negara Lebanon dengan negara Turki yaitu sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Sistem Administrasi Negara Lebanon Dengan Turki

Perbandingan	Persamaan		Perbedaan	
	Lebanon	Turki	Lebanon	Turki
Bentuk Negara	Republik	Republik	-	-
Bentuk Pemerintah	-	-	Republik Parlementer	Republik Presidensial
Sistem Pemerintah	-	-	Demokrasi Parlementer	Demokrasi Presidensial
Kepala Negara	Presiden	Presiden	-	-
Lembaga Negara	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Parlemen • Dewan Menteri 	<ul style="list-style-type: none"> • Parlemen • Presiden
Kategori Negara	Berkembang	Berkembang	-	-
Hukum Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Sipil • Hukum Negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Sipil • Hukum Negara 	-	-
Falsafah Negara	-	-	Sekularisme Demokrasi Keadilan Sosial	Sekularisme Nasionalisme Modernisasi

Birokrasi Negara	-	-	Sentralisasi Inefisien	Desentralisasi Efisien
Rekrutmen Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Meritokrasi Ujian 	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Meritokrasi Ujian 	-	-
Akuntansi	International Financial Reporting Standards (Ifrs)	International Financial Reporting Standards (Ifrs)	-	-

Keterangan:

Berdasarkan tabel dan jawaban sebelumnya, terdapat beberapa poin penting yang perlu dijelaskan secara detail terkait perbedaan sistem administrasi negara Lebanon dan Turki:

1. Lebanon adalah republik parlementer di mana kekuasaan terbagi antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat, sementara perdana menteri dan kabinetnya bertanggung jawab atas pemerintahan sehari-hari. Di sisi lain, Turki, juga sebuah republik, telah berubah menjadi republik presidensial setelah perubahan konstitusi pada tahun 2018. Dalam sistem ini, presiden tidak hanya menjadi kepala negara, tetapi juga kepala pemerintahan. Dipilih langsung oleh rakyat, presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang besar, termasuk dalam pengangkatan kabinet.
2. Baik Lebanon maupun Turki diklasifikasikan sebagai negara berkembang karena faktor-faktor seperti konflik internal, ketergantungan pada sektor jasa, dan infrastruktur yang belum matang (untuk Lebanon), serta tingkat pengangguran yang tinggi, kesenjangan ekonomi, dan ketergantungan pada impor energi (untuk Turki).
3. Di Lebanon, sistem hukum sipil berbasis hukum Romawi dan Prancis, sementara hukum agama juga signifikan terutama dalam pernikahan, perceraian, dan warisan. sementara di Turki, meskipun menggunakan sistem hukum sipil dari hukum Swiss dan Jerman, hukum Islam masih mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti hukum keluarga dan pidana.
4. Kedua negara, Lebanon dan Turki, memiliki prinsip dasar yang mendasari falsafah negara mereka. Lebanon menekankan pada sekularisme, demokrasi, dan keadilan sosial untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Di sisi lain, Turki juga mengadopsi prinsip sekularisme, namun, lebih menekankan pada nasionalisme dan modernisasi untuk mencapai persatuan dan kemajuan negara.
5. Dalam birokrasi negara Rekrutmen negara Lebanon Pegawai negeri direkrut berdasarkan meritokrasi, dengan calon harus melewati ujian dan tes untuk mendapatkan posisi. Sedangkan negara Turki Meskipun sistem rekrutmen juga berdasarkan meritokrasi di Turki, pengaruh afiliasi politik dan nepotisme masih terlihat dalam beberapa kasus.
6. Baik Lebanon maupun Turki mengadopsi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) dalam praktik akuntansi mereka. IFRS adalah kerangka kerja akuntansi global yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan konsisten di seluruh dunia. Dengan mengadopsi IFRS, baik Lebanon maupun Turki mengikuti standar yang diakui secara internasional, memungkinkan perbandingan yang lebih mudah antara laporan keuangan mereka dengan entitas bisnis di negara lain, serta mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

KESIMPULAN

Perbandingan antara Lebanon dan Turki mengungkapkan perbedaan signifikan dalam sistem pemerintahan, status ekonomi, hukum, falsafah negara, birokrasi, dan praktik akuntansi. Lebanon, sebagai republik parlementer, menegaskan pemisahan kekuasaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan, sementara Turki, dengan sistem presidensialnya yang baru, memberikan kekuasaan eksekutif yang besar kepada presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Keduanya diklasifikasikan sebagai negara berkembang dengan tantangan ekonomi dan infrastruktur yang masih perlu diperbaiki. Perbedaan dalam sistem hukum mencerminkan pengaruh sejarah dan budaya, dengan Lebanon mempertahankan aspek hukum sipil dan agama, sedangkan Turki menemukan keseimbangan antara hukum sipil dan hukum Islam. Falsafah negara mereka menekankan pada nilai-nilai sekularisme dan demokrasi (Lebanon) serta nasionalisme dan modernisasi (Turki). Di sektor birokrasi, walaupun keduanya menegakkan meritokrasi, namun, Turki masih memiliki masalah dengan pengaruh politik dan nepotisme dalam proses rekrutmen. Terakhir, baik Lebanon maupun Turki telah mengadopsi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik akuntansi mereka. Dengan demikian, perbandingan ini menyoroti kompleksitas dan keberagaman dalam administrasi negara dan menunjukkan tantangan serta peluang yang dihadapi oleh kedua negara dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan ekonomi mereka.

REKOMENDASI PENGEMBANGAN

Untuk mengembangkan negara-negara seperti Lebanon dan Turki, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan. Pertama, perlu dilakukan reformasi dalam sistem pemerintahan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Ini termasuk memperkuat lembaga-lembaga demokratis, memperbaiki proses pemilihan umum, dan mengurangi korupsi dalam birokrasi. Kedua, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas, termasuk investasi dalam transportasi, energi, dan teknologi informasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, peningkatan dalam sektor pendidikan dan pelatihan tenaga kerja penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempersiapkan tenaga kerja untuk pasar global yang semakin kompetitif. Keempat, perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil harus diperkuat untuk memastikan inklusivitas dan keadilan dalam masyarakat. Terakhir, kerjasama regional dan internasional dapat membantu mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Timur Tengah dan sekitarnya. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, Lebanon dan Turki dapat menuju ke arah pembangunan yang lebih baik dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Albarkah, N. R. (2023). *PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA DAN TURKI*. 14, 176–194.
- Audi Izzat Muttaqien. (2023). UNHCR's Influence on Turkish Government Policies towards the Refugees Crisis. *Global Strategis*, 17(2).
- Baharuddin Riqiey. (2024). *Mekanisme Pembubaran Partai Politik: Perbandingan IndonesiadanTurki*. 3(1), 22–33.
- Clovis F.Maksoud. (2022). *Economy of Lebanon*. Britannica.
<https://www.britannica.com/place/Lebanon/Trade>
- Crisnaldy, A., & Raya, U. P. (2021). *Literature review metodologi penelitian*. May.
- European Committee Of Regions. (n.d.). *Turki*. Division Of Power.
<https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/Turkey.aspx>
- Jocelyne Gerard and Carole Nehme. (2020). LIBANON. *Open Edition Journals*, 131, 5–8.
- Joseph Y Bakhach and Jana Doghman. (2023). Medical demography in Lebanon: Balancing demand and supply amidst crisis. *J GLOB HEALTH*, 13;03064.
- Laksono, T. M., Devina, F., Hang, U., Surabaya, T., & Artikel, H. (2023). *PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA CHINA*.

8(September), 56–67.

Mukhsinin, N. (2022). *Jurnal Middle East and Islamic Studies Relasi Sunni-Syi ' ah dalam Budaya Politik Sektarian dan Pengaruhnya Terhadap Pemerintahan Lebanon*. 9(2).

<https://doi.org/10.7454/meis.v9i2.150>

One World. (2024). *Turkey*. Nations Online.

Sami F.Sadaka. (2022). Challenges of IFRS implementation in emerging economies: The case of Lebanon. *Afaanz*, 27(4).

Samir G.Khalaf. (n.d.). *Government and Society*. Britannica. www.britannica.com/place/Lebanon/The-arts